

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya atau kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Metode pemberdayaan penelitian ini menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) PRA adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok metode pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak (Chambers, 1996).

Konsepsi dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Metode PRA bertujuan untuk menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar objek pembangunan.

Menurut Chamber (1995) (dalam Munawar, 2011) pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai – nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable*. Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata – mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic mental*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.

Suharto (2014:57), pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan dan keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan minat mereka.

Menurut Saparjan dan Suyanto (2003:43) pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan menentukan masa depan mereka. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan arah kehidupan dalam komunitasnya.

Pemberdayaan adalah konsep pembangunan yang merangkum nilai social. Konsep ini mencerminkan paradigm baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering and sustainable*” konsep ini lebih luas dari hanya semata – mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternative terhadap konsep – konsep pertumbuhan di masa yang lalu.

2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Mardikanto (2014 : 202) Menyatakan bahwa terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Perbaikan kelembagaan (*better institution*)
- 2) Kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- 3) Perbaikan usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- 4) Perbaikan pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 5) Perbaikan lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan

dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

- 6) Perbaikan kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- 7) Perbaikan masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

3. Prinsip – prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip pemberdayaan masyarakat (Najiati et al., 2005:54), yaitu :

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan anatar masyarakat dengan lembaga yang melakukan program – program pemberdayaan masyarakat, baik laki – laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, serta keahlian satu sama lain. Masing – masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saing belajar.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki

kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala – kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemampuan, serta memiliki norma – norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaan.

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pedamping lebih dominan disbanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendampingan akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri (Sumaryo, 1991).

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan oleh (Hikmat & Harry, 2006), yaitu :

- a. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
- b. Strategi direct-action. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan

yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.

- c. Strategi Transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya dengan kata lain pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui suatu proses belajar yang dilakukan secara bertahap hingga masyarakat mencapai kemandirian. Menurut Ambar Teguh (Muslim, 2012), menyatakan bahwa tahap – tahap yang harus dilalui tersebut adalah :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

Tahap pertama adalah tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdayaan atau aktor pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat yang efektif.

- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan. Kecakapan – keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

Tahap kedua atau tahap transformasi kemampuan yaitu proses mentransformasikan pengetahuan dan kecakapan keterampilan. Proses tersebut dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum pada taraf objek.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap ketiga atau tahap peningkatan intelektual dan kecakapan –

keterampilan merupakan tahap yang diperlukan agar masyarakat dapat membentuk kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi – kreasi, dan melakukan inovasi – inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan, masyarakat pada kondisi ini ditempatkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama, pemerintah hanya dapat menjadi fasilitator saja.

6. Pola Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Hadiwijoyo (2012 : 34 - 35), menurut Ross (1987 : 77 – 78) mengemukakan 3 pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, yaitu:

a. *The “single function” approach in which programmes or techniques are implanted by external agents.” A new school a medical program or a housing project, which the external agent (or the organization the presents) thinks will benefit the community.*

Artinya, Pendekatan “suatu fungsi” dimana program atau teknik ditanamkan oleh agen eksternal. Sekolah baru, program medis, atau proyek perumahan, yang mana agen eksternal (atau organisasi yang dia berikan) merupakan sesuatu yang akan bermanfaat bagi masyarakat.

Maksudnya, program atau teknik pembangunan, keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan dari luar masyarakat. Umumnya pola pendekatan ini kurang mendapatkan respon dari masyarakat, karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasi yang baik sulit di adopsi. Pola ini menjadikan masyarakat tergantung kepada mereka, sehingga prakarsa masyarakat tidak berkembang.

b. *The “multiple” approach in which there is recognition of the wholeness of community life and a team of experts seeks to provide a variety services and to solve some of the problems which may arise as alterations are made in the community.*

Artinya, pendekatan multi adalah pendekatan dimana ada pengakuan keutuhan kehidupan masyarakat dan tim pembaca berusaha untuk menyediakan berbagai layanan dan untuk memecahkan beberapa masalah yang

mungkin timbul sebagai perubahan yang dibuat dimasyarakat.

Pola pendekatan the multiple approach, dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini, juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimum, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar.

c. *The “inner resources approach”. Here stress is laid on the need to encourage communities of people to identify their own wants and needs and to works co – operatively with governmental and other agencies al satisfying them.*

Arinya, “pendekatan sumber daya manusia” disini ditekankan pada perlunya mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan mereka sendiri dan bekerja secara kooperatif dengan badan – badan pemerintahan dan lainnya untuk mensosialisasikan.

2.1.2. Peran Agen Pembaharu dalam Pembangunan Berbasis Pemberdayaan

1. Pengertian Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Averroes (2009) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*). Karena praktiknya saling tumpang tindih. Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep di bangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- a. Proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi.
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran.
- c. Kekuasaan akan membangun atas atau sistem pengetahuan sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi.

- d. Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tundaya.

Alur pikir diatas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah *empowerment* yang berawal dari kata daya (*power*). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidak seimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya power dis powerment, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power. Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan.

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan nasional akan menghasilkan masyarakat yang mandiri dan teruji kapasitasnya sebagai pengguna dan perencanaan pembangunan. Pada proses pembangunan nasional sesuai teknologi 4.0 dengan hadirnya pemerintah dan masyarakat dalam bekerjasama akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal, karena perencanaan dan pengendalian serta evaluasi akan berjalan seiring sesuai dengan tahapan pembangunan.

Pembangunan masyarakat yang tidak memposisikan masyarakat sebagai subjek hanya akan melahirkan produk – produk pembangunan baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga akan kurang berarti bagi masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa adanya peran dan pengendalian serta evaluasi yang optimal dari pemerintah atau seperti Agen Pembaharu pembangunan tidak akan berjalan secara teratur dan tidak terarah, yang akhorna akan menimbulkan permasalahan baru.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat membutuhkan metode dan strategi yang baik agar hasil pembangunan akan lebih efektif dan efisien. Penyusunan dan penggunaan metode serta strategi pembangunan akan menentukan peran dari masing-masing stakeholder apakah peran masyarakat maupun peran pemerintah dalam merencanakan dan mengimplementasikan hasil pembangunan, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Pembangunan melalui keikutsertaan masyarakat melambangkan salah satu usaha untuk mengembangkan potensi masyarakat dalam mempersiapkan pembangunan potensi masyarakat dalam mempersiapkan pembangunan yang berhubungan dengan kapasitas sumber daya lokal berlandaskan amatan musyawarah, yakni kemajuan harapan berupa keinginan dan kebutuhan riil yang ada dalam masyarakat, kemajuan dukungan dan peran-serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dan kemajuan rasa-memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.

Secara profesional, fokus ini dibenarkan oleh adanya pengaruh dimana para ahli ekonomi memiliki kemampuan atas pembuatan kebijakan, bila dibandingkan dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya berbeda dengan Chambers (Pieters,1998) mengemukakan dasar pembangunan tidak seperti biasanya dan mungkin ada perdebatan bahwa kunci pertanyaan antara apakah pertumbuhan dan produksi dipertimbangkan sebagai di dalam atau di luar pendekatan pembangunan dari *people-centered* dan apakah ini sejalan dengan program penyesuaian *structural* yang diikuti dengan institusi keuangan internasional (*post-development*) dapat diartikan sebagai reaksi neo-tradisional terhadap modernitas. Pada tahun 1970, ketidakpuasan terhadap pembangunan dasar bertumpu pada suatu alternatif, yakni *people-centered*.

Pemikiran diatas sebagai pembangunan alternatif. Alternatif secara umum mengarah kepada tiga bentuk yaitu: agen pembaharu, metoda, dan objek atau nilai dari pembangunan yang sering kali menjadi kunci utama pembangunan masyarakat adalah pembangunan dari bawah yang mengacu pada komunitas maupun LSM.

2. Tujuan Pembangunan Masyarakat

Tujuan pembangunan masyarakat yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan, dan penjabaran kebijaksanaan dan program pembangunan nasional. Tujuan pembangunan masyarakat menurut Sutarya yaitu: (a) masyarakat yang gemar membangun, (b) masyarakat mandiri, (c) masyarakat kooperatif, dan (d) masyarakat partisipatif.

Keempat kondisi itu harus menjadi acuan bagi setiap pelaksanaan dan pengembangan program pembangunan masyarakat. Masyarakat gemar membangun berarti proses pembangunan masyarakat dapat membawa pada proses pembiasaan diri dengan berdasarkan kepada kebutuhan membangun menjadi titik tolak utama. Dalam prosesnya itu dilakukan dengan cara partisipasi, kerjasama (kooperatif) berdasarkan dengan motto pembangunan masyarakat (*community development*) yaitu: “*To help people them selves*”.

3. Tahap Pembangunan Masyarakat

Tahap pembangunan masyarakat menurut Walt Whitwan Rostow ada 5 (lima) tahap, yaitu:

1. Tahap Masyarakat Tradisional, ada 3 (tiga) ciri dalam tahap masyarakat tradisional:
 - a. Tingkat produksi perkapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian.
 - b. Struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarkis dimana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang.
 - c. Kebijakan Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah.

2. Tahap Prasyarat Lepas Landas

Pada tahap ini dibedakan menjadi dua ciri yaitu:

- a. Tahapan yang dicapai oleh negara-negara sepe Eropa, Asia Timur, Timur Tengah dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada.
- b. Tahapan yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru (*born free*) yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada.

3. Tahap Lepas Landas

Ciri-ciri dari tahap lepas landas yaitu:

- a. Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto.
- b. Terjadi perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi.
- c. Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan menciptakan:
- d. Segala gejala-gejala untuk membuat perluasan di sektor modern.
- e. Potensi eksternalitas ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus menerus terjadi.

4. Tahap Menuju Kematangan

Pada tahap ini keadaan perekonomian yang terus menerus bertumbuh meskipun kadang-kadang disertai dengan laju yang fluktuatif, terjadi perluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan-kegiatan perekonomian, timbul industri-industri baru dengan cepat dan tertinggal sehingga barang-barang yang dulunya impor sekarang mampu diproduksi di dalam negeri sendiri.

5. Tahap Konsumsi Tinggi

Pada tahap konsumsi tinggi ini pendapatan rill perkapita meningkat sampai pada suatu titik dimana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan.

Rostow juga menyebutkan ada tiga macam tujuan masyarakat yang

saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan politik antara lain:

- a. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut terhadap negara lain.
- b. Menciptakan suatu welfare state yang kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif.
- c. Meningkatkan konsumsi masyarakat dari konsumsi kebutuhan primer menjadi konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier.

4. Pengertian Agen Pembaharu

Havelock (dalam Nasution & Zulkarimen, 2004, hlm. 56) mengemukakan Agen Pembaharu ialah seseorang yang melakukan perubahan sosial atau yang mempunyai suatu ide inovasi yang berencana. Ibrahim, 1988, hlm. 100 (Setyoningrum, n.d.) mengemukakan bahwa agen pembaharu (*agent of change*) ialah orang yang bertugas mempengaruhi klien agar mau menerima inovasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pengusaha pembaharu. Hal ini sesuai dengan yang di ungkap oleh (Rogers & Everett, 2004, hlm. 313) bahwa berbagai macam pekerjaan seperti: guru, konsultan, penyuluh kesehatan, penyuluh keluarga berencana, penyuluh pertanian dan sebagainya disebut agen pembaharu.

Pengenalan dan dapat menerapkan hal atau gagasan ide – ide baru sehingga dapat dikenal dan disebut sebagai inovasi, sehingga dilakukan dengan penuh harapan agar kehidupan masyarakat yang bersangkutan atau yang mengalami sikap optimis tersebut akan termotivasi demi terciptanya perubahan dan inovasi yang diharapkan tadi. Segala sesuatu tidak akan berhasil dan tidak akan mudah ketika dirubah tanpa adanya sikap optimis dan kepercayaan terhadap diri sendiri bahwa dapat melakukan perubahan tersebut (dalam Nasution & Zulkarimen, 2004, hlm. 37).

Rogers dan Shoemaker (dalam Nasution & Zulkarimen, 2004, hlm. 129), mengemukakan bahwa Agen Pembaharu yaitu berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antardua (atau lebih) sistem sosial, dengan menghubungkan antara suatu sistem sosial masyarakat yang dibinanya dalam usaha perubahan tersebut.

Hal ini tercermin dalam peranan utama seorang Agen Pembaharu:

- a. Sebagai katalisator, menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan perubahan.
- b. Sebagai pemberi pemecahan persoalan.
- c. Sebagai penghubung (linker) dengan sumber – sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
- d. Sebagai pembantu proses perubahan; membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk mengenai bagaimana:
 - 1) Mengenali dan merumuskan kebutuhan.
 - 2) Mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan.
 - 3) Mendapatkan sumber – sumber yang relevan.
 - 4) Memilih dan menciptakan pemecahan masalah, dan
 - 5) Menyesuaikan dan merencanakan tahapan pemecahan masalah.

5. Peran Agen Pembaharu dalam Pembangunan Masyarakat

(Rogers & Everett, 1983, hlm. 314-315) mengemukakan adanya 7 langkah kegiatan agen pembaharu dalam pelaksanaan tugasnya memperkenalkan inovasi tunggal kepada sistem klien:

- 1) Membangun kebutuhan untuk berubah. Sebagai seorang agen pembaharu pada awalnya sering dituntut membantu binaannya untuk menyadari kebutuhan dalam mengubah perilaku / kebiasaannya. Dalam upaya melalui proses perubahan, agen pembaharu menunjukkan alternatif – alternatif terhadap masalah yang ada, mendramatiskan petingnya masalah itu, dan mengatasi masalah itu. Agen pembaharu pada tahap ini menilai kebutuhan binaan, dan mungkin juga membantu menciptakan kebutuhan ini dalam bentuk tindakan konsultatif.
- 2) Menjalin hubungan tukar – informasi. Begitu kebutuhan untuk berubah tercipta, agen pembaharu harus membangun kedekatan dengan binaannya. Agen pembaharu dapat memperkuat hubungan dengan binaannya dengan

menciptakan kepercayaan terhadap kompetensinya, kesungguhannya, dan empati dengan kebutuhan dan masalah binaan. Binaan haruslah menerima Agen Pembaharu sebelum mereka menerima inovasi yang mereka promosikan, sebab inovasi sering dianggap atau dasar pandangan orang terhadap Agen Pembaharu.

- 3) Mendiagnosis masalah mereka. Agen Pembaharu harus bertanggung jawab dan menganalisis situasi bermasalah binaannya dalam upaya menentukan bagaimana alternatif yang ada yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai simpulan diagnosis, Agen Pembaharu harus melihat situasi secara empatik dari pandangan binaannya, tidak dari sudut pandangnya sendiri.
- 4) Menumbuhkan niat untuk berubah pada binaan. Setelah Agen Pembaharu menggali berbagai macam cara yang mungkin dapat dicapai oleh klien untuk mencapai tujuan, maka Agen Pembaharu bertugas untuk mencari cara memotivasi dan menarik perhatian agar klien timbul kemauannya untuk berubah atau membuka dirinya untuk menerima inovasi.
- 5) Mengarahkan kehendak ketindakan. Agen Pembaharu mencoba untuk sikap klien dalam menyesuaikan saran atau rekomendasi berdasarkan kebutuhan para klien. Jaringan interpersonal memengaruhi dari pengamatan jarak dekat yang paling penting pada tahap persuasi dan keputusan dalam proses pengambilan keputusan inovasi.
- 6) Memantapkan adopsi dan mencegah diskotinya. Agen Pembaharu bisa dengan efektif memantapkan kebiasaan baru dengan menciptakan pesan yang menguatkan kepada para binaan yang telah mengadopsi inovasi, jadi “membekukan” kebiasaan baru. Bantuan ini sering dilakukan bila binaan pada tahap pelaksanaan atau konfirmasi dalam proses keputusan inovasi.
- 7) Mengakhiri hubungan ketergantungan. Tujuan akhir seorang Agen ialah mengembangkan kebiasaan membarui diri sendiri dikalangan masyarakat binaannya. Agen Pembaharu hendaknya berusaha menempatkan dirinya di luar dengan cara mengembangkan kemampuan binaan untuk menjadi Agen

Pembaharu bagi diri mereka sendiri. Dengan kata lain, Agen Pembaharu berusaha mengubah binaan dari posisi bergantung dengan Agen Pembaharu menjadi mandiri.

6. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Agen Pembaharu

Menurut (Rogers & Everett, 1983, hlm. 315), faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan agen pembaharu, berkenaan dengan hal – hal berikut:

- 1) *Usaha Agen Pembaharu*, sebagai indikator untuk mengetahui kegigihan usaha yang dilakukan Agen Pembaharu. Sebagai indikator untuk mengetahui kegigihan (besarnya) usaha Agen Pembaharu adalah: jumlah klien yang dihubungi untuk berkomunikasi, banyaknya waktu digunakan untuk berpartisipasi di desa (tempat tinggal) klien dibandingkan dengan waktu di kantor atau dirumah sendiri, banyaknya keaktifan yang dilakukan dalam proses difusi inovasi, ketepatan memilih waktu untuk berkomunikasi dengan klien dan sebagainya. Makin banyak klien yang dihubungi, makin banyak waktu yang digunakan di tempat klien, makin banyak keaktifan yang dilakukan dalam proses difusi dan makin tepat Agen Pembaharu memilih waktu untuk berkomunikasi dengan klien, dikatakan makin gigih atau makin besar usaha klien untuk kontak dengan klien. Dari berbagai bukti dirumuskan generalisasi bahwa keberhasilan agen pembaharu berhubungan positif dengan besarnya usaha mengadakan kontak dengan klien.
- 2) *Orientasi pada klien*, agen pembaharu harus mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada pengusaha pembaharuan, tetapi di lain pihak Agen Pembaharu juga harus bekerja bersama dan untuk memenuhi kepentingan klien. Agen pembaharu akan mengalami kesukaran jika apa yang diminta oleh pengusaha pembaharu tidak sesuai dengan kebutuhan klien.

- 3) *Klien*. Agen Pembaharu harus menunjukkan keakraban dengan klien, memperhatikan kebutuhan klien, sehingga memperoleh kepercayaan yang tinggi jadi klien. Dengan dasar hubungan yang baik itu Agen Pembaharu dapat mengambil kebijakan menyesuaikan kebutuhan klien dengan kemauan pengusaha pembaharuan. Tetapi jika Agen Pembaharu tampak berorientasi pada pengusaha pembaharuan, maka akan dianggap lawan oleh klien dan sama sekali tidak dapat mengadakan kontak atau komunikasi. Dari berbagai bukti hasil pengamatan dan penelitian dirumuskan bahwa keberhasilan agen pembaharu berhubungan positif dengan orientasi pada klien dari pada orientasi pada pengusaha pembaharuan.
- 4) *Kebutuhan klien*, adalah salah satu Agen Pembaharu yang sangat penting dan sukar melaksanakan ialah mendiagnosa kebutuhan klien. Banyak terbukti usaha difusi inovasi gagal karena tidak mendasarkan kebutuhan klien, tetapi lebih mengutamakan pada target inovasi sesuai kehendak pengusaha pembaharuan.
- 5) *Empati*, seperti telah kita ketahui bahwa empati akan mempengaruhi efektifitas komunikasi. Komunikasi yang efektif akan mempercepat diterimanya inovasi. Keberhasilan Agen Pembaharu sangat berhubungan positif dengan empatik terhadap klien. Perlu diperhatikan bahwa makin banyak perbedaan antara Agen Pembaharu dengan klien makin sukar Agen Pembaharu akan menunjukkan rasa empatik. Untuk mengatasi hal ini biasanya diadakan pemilihan calon Agen Pembaharu dipikirkan orang yang mempunyai latar belakang kehidupan sesuai dengan klien dimana Agen Pembaharu akan berkerja.
- 6) *Homofili*, sebagaimana telah kita ketahui yang dimaksud dengan homofili adalah pasangan individu yang berinteraksi yang memiliki ciri – ciri atau karakteristik yang sama (sama bahasa, kepercayaan, adat istiadat dan sebagainya). Heterofili adalah pasangan individu yang berinteraksi dengan memiliki ciri – ciri atau karakteristik yang sama dengan klien lebih disegani, dan lebih suka mengadakan dengan klien yang memiliki persamaan dengan

dia.

- 7) *Kontak Agen Pembaharu dengan klien yang berstatus lebih rendah*, sebenarnya klien yang kurang mampu ekonominya, rendah pendidikannya, harus mendapat lebih banyak bantuan dan bimbingan dari agen pembaharuan. Tetapi sesuai dengan prinsip homofili maka Agen Pembaharu lebih banyak kontak dengan klien yang berstatus lebih tinggi baik pendidikan maupun ekonominya. Sehingga dapat timbul pendapat yang kurang benar dari Agen Pembaharu yang menyatakan bahwa klien yang berstatus lebih rendah tidak termasuk tanggung jawabnya dalam pelaksanaan difusi inovasi. Jika ini terjadi maka akibatnya makin parah, karena makin terbuka kemungkinan klien yang berstatus lebih rendah tidak terjamah sama sekali oleh bantuan Agen Pembaharu. Salah satu cara untuk mengatasi dengan jalan memilih pembaharuan yang sedapat mungkin sama dengan klien atau paling tidak dapat mendekati, misalnya sama daerahnya, sama bahasanya, sama kepercayaannya dan sebagainya.
- 8) *Pembantu para profesional*, yaitu orang yang bertugas membantu Agen Pembaharu agar terjadi kontak dengan klien yang berstatus lebih rendah. Para pembantu yang profesional dari segi pengetahuan tentang inovasi dan teknik penyebaran inovasi, kurang dari Agen Pembaharu. Tetapi dengan mengangkat pembantu para profesional ada keuntungannya yaitu biaya lebih rendah dapat kontak dengan klien yang berstatus lebih rendah dari Agen Pembaharu, karena para pembantu para profesional lebih dekat dengan klien (homofili).
- 9) *Kepercayaan klien terhadap Agen Pembaharu (credibility)*, pembantu Agen Pembaharu kurang memperoleh kepercayaan dari klien, jika ditinjau dari segi kompetensi profesional karena mereka memang kurang profesional. Tetapi pembantu Agen Pembaharu, memiliki kepercayaan dari klien karena adanya hubungan yang akrab sehingga tidak timbul kecurigaan. Klien percaya pada pembantu Agen Pembaharu karena adanya keyakinannya akan membawa kebaikan bagi dirinya, yang disebut: kepercayaan, keselamatan (*savety, credibility*). Pada umumnya Agen Pembaharu (profesional dan heterofili)

memiliki kepercayaan kompetensi (*competency credibility*), sedangkan pembantu agen pembaharu (tidak profesional dan homofili) memiliki kepercayaan keselamatan (*savety, credibility*). Seharusnya Agen Pembaharu yang ideal harus memiliki kedua kepercayaan tersebut secara harus seimbang. Tetapi hal ini sukar diperoleh, karena jika Agen Pembaharu itu profesional berarti ia adalah seorang sarjana yang menguasai ilmu dan teknik, maka timbul perbedaan dengan klien yang berpendidikan rendah (heterofili). Salah satu cara untuk mengatasi ini dengan jalan mengangkat orang yang telah menerima dan menerapkan inovasi, sebagai pembantu Agen Pembaharu mempengaruhi teman – temannya (anggota sistem klien yang lain) untuk menerima inovasi.

- 10) *Profesional semu*, sebagaimana kita ketahui pembantu Agen Pembaharu dapat memberikan beberapa keuntungan seperti biaya operasional rendah, dan dapat menjembati kesenjangan heterofili, namun tidak berarti bahwa Agen Pembaharu lalu sama sekali tidak diperlukan. Agen Pembaharu tetap masih sangat dibutuhkan untuk menatar atau memilih pembantu Agen Pembaharu, mengadakan super visi, dan juga membantu dalam mencegah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pembantu Agen Pembaharu. Salah satu masalah yang sering dijumpai pembantu Agen Pembaharu adalah timbulnya profesional semu yang terjadi karena pembantu Agen Pembaharu bergaya seperti Agen Pembaharu profesional.
- 11) *Pemuka pendapat*, di muka masyarakat atau sistem sosial yang sering dijumpai orang dalam menyampaikan pendapat–pendapatnya, lalu mudah diikuti oleh teman sekelompoknya. Orang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perubahan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku orang lain secara informal, dengan tujuan tertentu, disebut pemuka pendapat.
- 12) *Kemampuan klien untuk menilai inovasi*, adalah salah satu keunikan Agen Pembaharu dalam proses difusi inovasi, yaitu seorang memiliki *kompetensi* teknik, yang menyebabkan mereka berwenangan untuk bertindak sesuai dengan keahliannya dalam mempengaruhi klien untuk menerima inovasi. Tetapi jika Agen Pembaharu melakukan pendekatan jangka panjang dalam mencapai tujuan inovasi, maka mereka harus berusaha membangkitkan klien untuk memiliki kemampuan teknik dan kemampuan menilai potensi inovasi

yang dicapainya sendiri. Dengan kata lain Agen Pembaharu harus berusaha menjadikan klien menjadi Agen Pembaharu dirinya sendiri. Bahwa keberhasilan Agen Pembaharu sangat berhubungan positif dengan meningkatnya kemampuan klien untuk menilai inovasi. Tetapi pada umumnya Agen Pembaharu hanya bekerja dalam jangka pendek, terutama dalam melancarkan proses kecepatan diterimanya inovasi. Kesadaran dan kemampuan memperbaharui dirinya dengan percaya kepada kemampuan sendiri menjadi tujuan dari pengusaha pembaharuan, sedangkan seberapa kadar yang dapat dicapai tergantung pada usaha agen pembaharu.

2.1.3 Perencanaan dalam Perintisan Kampung Wisata Edukasi Berbasis Ekologi

2.1.3.1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan wisata adalah proses yang sangat kompleks dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan segmen dari pariwisata. Perencanaan yang tepat mengenai fisik, hukum, promosi, keuangan, pasar ekonomi, manajemen, sosial dan aspek lingkungan akan dapat membantu mengembangkan pariwisata dengan cara yang menguntungkan. Menurut D. Getz (1987) (dalam buku Wardiyanto & Baiquni, 2011) mendefinisikan perencanaan pariwisata sebagai : “Sebuah Proses, berdasarkan penelitian dan evaluasi, yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kontribusi pariwisata untuk kesejahteraan manusia dan kualitas lingkungan”.

Perencanaan pada dasarnya ialah penetapan alternatif dalam menentukan bidang dan langkah perencanaan yang akan diambil dari berbagai kemungkinan bidang dan langkah yang ada. Bidang dan langkah yang diambil ini tentu saja yang dipandang sesuai dengan tujuan yang dicapai, sumber daya yang tersedia dan mempunyai resiko yang sekecil – kecilnya. Oleh sebab itu, dalam penentuannya timbul berbagai bentuk perencanaan yang merupakan alternatif – alternatif ditinjau dari berbagai sudut, antara lain :

1. Dari segi jangka waktu, perencanaan dapat dibedakan: (a) perencanaan jangka

pendek (1 tahun), dan (b) perencanaan jangka panjang (lebih 1 tahun).

2. Dari segi luas lingkungannya, perencanaan dapat dibedakan: (a) perencanaan nasional (umumnya untuk mengejar keterbelakangan suatu bangsa dalam berbagai bidang), (b) perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah itu), dan (c) perencanaan lokal, misalnya: perencanaan kota (untuk mengatur pertumbuhan kota, menertibkan penggunaan tempat dan memperindah corak kota) dan perencanaan desa (untuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan masyarakat desa tersebut).
3. Dari segi bidang kerja yang dicakup, dapat dikemukakan antara lain: industrialisasi, agrarian (pertanahan), pendidikan, kesehatan, pertanian, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.
4. Dari segi tata jenjang organisasi dan tingkat kedudukan manajer, perencanaan dapat dibedakan: (a) perencanaan haluan *policy planning*, (b) perencanaan program (*program planning*), dan (c) perencanaan langkah operasional program (*operational planning*).

Pembangunan masyarakat dapat dilihat dari mekanisme perubahan dalam rangka mencapai tujuannya, kegiatan pembangunan masyarakat harus mengutamakan dan memberikan penekanan untuk bagaimana prosesnya sampai suatu hasil pembangunan bisa terwujud, dan ada pula yang lebih menekankan pada hasil material, dalam pengertian proses dan mekanisme perubahan untuk mencapai suatu hasil material tidak begitu dipersoalkan, yang penting dalam waktu relatif singkat dapat dilihat hasilnya secara fisik.

2.1.3.2. Pentingnya Perencanaan dalam Pembangunan Wisata

Pembangunan pariwisata akan melibatkan dua sektor, yakni sektor publik dan swasta. Perencanaan pariwisata terutama perencanaan pembangunan ekonomi yang diarahkan pada tujuan berkaitan dengan pariwisata yang berbeda antara sektor publik dan sektor swasta. Disektor publik, perencanaan sebagian besar dilakukan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda. Sektor publik perencanaan pariwisata mencakup pertimbangan ekonomi dan faktor sosial, kebijakan penggunaan tanah dan control zonasi, masalah lingkungan, pembangunan

infrastruktur, kerja keprihatinan, dan penyediaan layanan publik.

Perencanaan pariwisata penting karena memberikan visi arah, dan komitmen bersama untuk pariwisata yang merupakan hasil partisipasi dari banyak pihak, yaitu:

1. Fenomena pariwisata makin kompleks dari yang pernah terfikir sebelumnya.
2. Pariwisata berdampak positif dan negatif.
3. Pariwisata makin kompetitif dan promosi destinasi wisata makin gencar.
4. Pariwisata bisa berakibat buruk pada sumberdaya alam dan budaya.
5. Pariwisata mempengaruhi semua orang dalam komunitas tertentu dan semua yang terlibat dalam pariwisata perlu berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata.

Proses perencanaan wisata meliputi :

- a. Menilai dampak yang mungkin timbul dari pembangunan dan masalah sumber daya yang akan dihadapi.
- b. Menganalisis status kompetitif tujuan dan kemampuannya untuk merespon perubahan dalam perjalanan pasar.
- c. Memberikan tingkat stabilitas dan prediktabilitas dalam kemajuan pengembangan pariwisata secara keseluruhan di suatu daerah.

2.1.3.3. Manfaat Perencanaan Wisata

Rencana pariwisata merupakan sebuah konsep yang memiliki banyak sekali arti dan cakupannya sangat luas, dapat didefinisikan sebagai dokumen yang memuat rencana strategi, meliputi: identifikasi masalah, tujuan pengembangan, sasaran pengembangan, dan strategi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan pariwisata. Ada beberapa definisi tersebut termuat tiga arti, yaitu :

- a. Rencana merupakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan

Perencanaan pariwisata merupakan sebuah aktivitas yang meliputi 3 sub kegiatan yang harus dilaksanakan untuk pengembangan pariwisata pada saat mengembangkan pariwisata. Kegiatan yang dimaksud adalah: mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan strategi yang secara tepat dapat memecahkan segala permasalahan yang terkait dengan upaya pengembangan pariwisata dapat

dilaksanakan secara efektif dan mendatangkan manfaat.

b. Rencana Merupakan Suatu Upaya Pemanfaatan Sumberdaya

Perencanaan pariwisata merupakan aktivitas manusia dalam memanfaatkan segala sumberdaya yang ada di suatu daerah secara sistematis dan terkontrol untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan pariwisata, yakni terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan, dan terjaga kelestarian sumberdaya yang menjadi daya tarik, serta bermanfaat bagi masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Sumberdaya yang dimaksud berupa: alam dan budaya manusia, maupun kegiatan manusia.

c. Rencana Merupakan Alat Untuk Mencapai Tujuan

Perencanaan pariwisata dapat dipandang sebagai sarana yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan pariwisata. Jadi dalam hal ini perencanaan dilihat sebagai kata benda, yakni berupa alat yang digunakan untuk sarana mengembangkan pariwisata. Dengan demikian rencana pariwisata berupa tahapan pelaksanaan proyek pengembangan pariwisata yang dapat diikuti oleh pengembangan pariwisata supaya pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara efektif.

2.1.3.4. Pengertian Ekologi

Secara harafiah ekologi yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya atau dengan kata lain mempelajari hubungan timbal – balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi hanya bersifat eksploratif dengan tidak melakukan percobaan, jadi hanya memanfaatkan dan mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam.

Pada saat ini ekologi sangat berperan aktif dalam keperluan dan kepentingan, ekologi berkembang sebagai ilmu yang tidak hanya bisa mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam. Ekologi sangat berkembang menjadi ilmu yang dapat mempelajari struktur dan fungsi ekosistem (alam), sehingga kita dapat menganalisis dan memberi jawaban terhadap berbagai kejadian alam.

Menurut Zoer'aini (2003) (dalam Utomo et al., n.d.), ada beberapa hal yang harus kita pelajari dalam ekologi, yaitu:

1. Bagaimana alam bekerja.
2. Bagaimana species beradaptasi dalam habitatnya.
3. Apa yang diperlukan organisme dari habitatnya untuk melangsungkan kehidupan.
4. Bagaimana organisme mencukupi kebutuhan materi dan energi.
5. Bagaimana interaksi antar species dalam lingkungan.
6. Bagaimana individu – individu dalam spesies diatur dan berfungsi sebagai populasi.
7. Bagaimana keindahan ekosistem tercipta.

Dari penjelasan dan perpaduan harafiah, maka ekologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari seluruh pola dan hubungan yang timbal – balik antar makhluk hidup dan juga dengan lingkungan saling berhubungan aktif. Manusia sebagai makhluk yang hidup juga menjadi pembahasan yang sangat penting dalam kajian ekologi, karena ekologi menjadi jembatan antar ilmu alam dan ilmu sosial.

2.1.3.5. Kedudukan Dan Perkembangan Ekologi

Pembahasan ekologi dalam ilmu biologi yaitu ekologi sejajar dengan bagian dasar yang lain, misalnya biologi molekuler, biologi perkembangan, genetika, fisiologi, hingga morfologi. Ekologi sangat berkembang dalam perkembangan ilmu dan teknologinya. Perkembangan ekologi mempengaruhi ilmu yang lain, demikian juga perkembangan ilmu yang lain mempengaruhi ekologi.

Corak pertumbuhan dan perkembangan ilmu ekologi, seorang ahli ilmu hayat pencipta ilmu ekologi bernama Haeckel (1866) mengatakan bahwa ilmu ekologi tergolong dalam disiplin “biologi”, karena ilmu ekologi mempelajari persyaratan biologis bagi jasad dan makhluk hidup dalam lingkungannya. Maka, para ahli biologi mengatakan bahwa ilmu ekologi tidak mendapatkan perhatian secara layak, karena ada beberapa ahli dari pengembangan ilmu ekologi yang mengembangkan ilmu ekologi diantaranya ahli dalam bidang geografi fisik dan biografi.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

- a. Lestari (2009), kaitan dengan penelitian saya antara Pemberdayaan Masyarakat dengan Pengembangan Pariwisata Khususnya di Kampung Wisata bina yaitu dijadikan salah satu upaya dalam memberdayakan masyarakat. Pada pengembangan Kampung Wisata ini pun sangat melibatkan masyarakat setempat guna masyarakat menjadi aktif dan inovatif, melibatkan masyarakat sepenuhnya itu dimulai dari pembentukan, pelaksanaan sampai pemeliharaan pun masyarakat sangat ikut andil. Maka, pemeliharaan desa dan pengelolaan Kampung Wisata ini pun dipegang penuh oleh masyarakat setempat, karena dengan adanya pelibatan masyarakat setempat langsung ini merupakan suatu bentuk pemberdayaan masyarakat dan melatih interaksi dengan orang lain, bahkan dengan adanya interaksi tersebut akan dan dengan banyaknya wisatawan yang datang akan memberikan penghasilan pendapatan tersendiri bagi masyarakat. Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan masyarakat Kembang Arum adalah adanya sistem bagi hasil bagi masyarakat jika ada wisatawan berkunjung. Sama dengan halnya di Kampung Wisata Legokawi pun penghasilan akan dibagi hasil dengan masyarakat setempat. Maka untuk meminimalisir kecemburuan sosial dalam hal ini kita menggunakan sistem bagi hasil, walaupun semua ini bukan sebagai pendapatan utama setidaknya akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari.
- b. Sabtimarlia (2015), mengatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata Samba Di Dusun Sambi, Perkembinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek ekonomi dengan mendapatkan penghasilan tambahan, sama dengan halnya pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Wisata Legokawi disana kita fokuskan pada meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat agar masyarakat dapat penghasilan tambahan bahkan menambah kreativitas masyarakat lalu membentuk kedua

aspek sosial dengan terbentuknya kelompok – kelompok kerja dan keterlibatan masyarakat dalam kepengurusan merupakan wujud dari kemampuan masyarakat dalam kehidupan sosial, dan ketiga aspek kultural dengan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya. Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Desa Wisata Sambu, dan tergalinya sumber daya alam dan budaya secara maksimal. Peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dapat dilihat dari terbentuknya kelompok karya catering wisata, kelompok tukang dan kelompok pemandu yang berasal dari masyarakat Dusun Sambu yang telah mengikuti keterampilan serta tambahan penghasilan. Lalu pada penelitian yang saya lakukan di Kampung Wisata Legokawi kita memfokuskan pada keterampilan dan keterampilan juga, tidak hanya itu saja bahkan di Kampung Wisata Legokawi kita memperkenalkan budaya yang harus kita lestarikan sebagai ciri khas Kampung Legokawi, maka selain berlibur masyarakat bisa belajar juga di Kampung Wisata Legokawi.

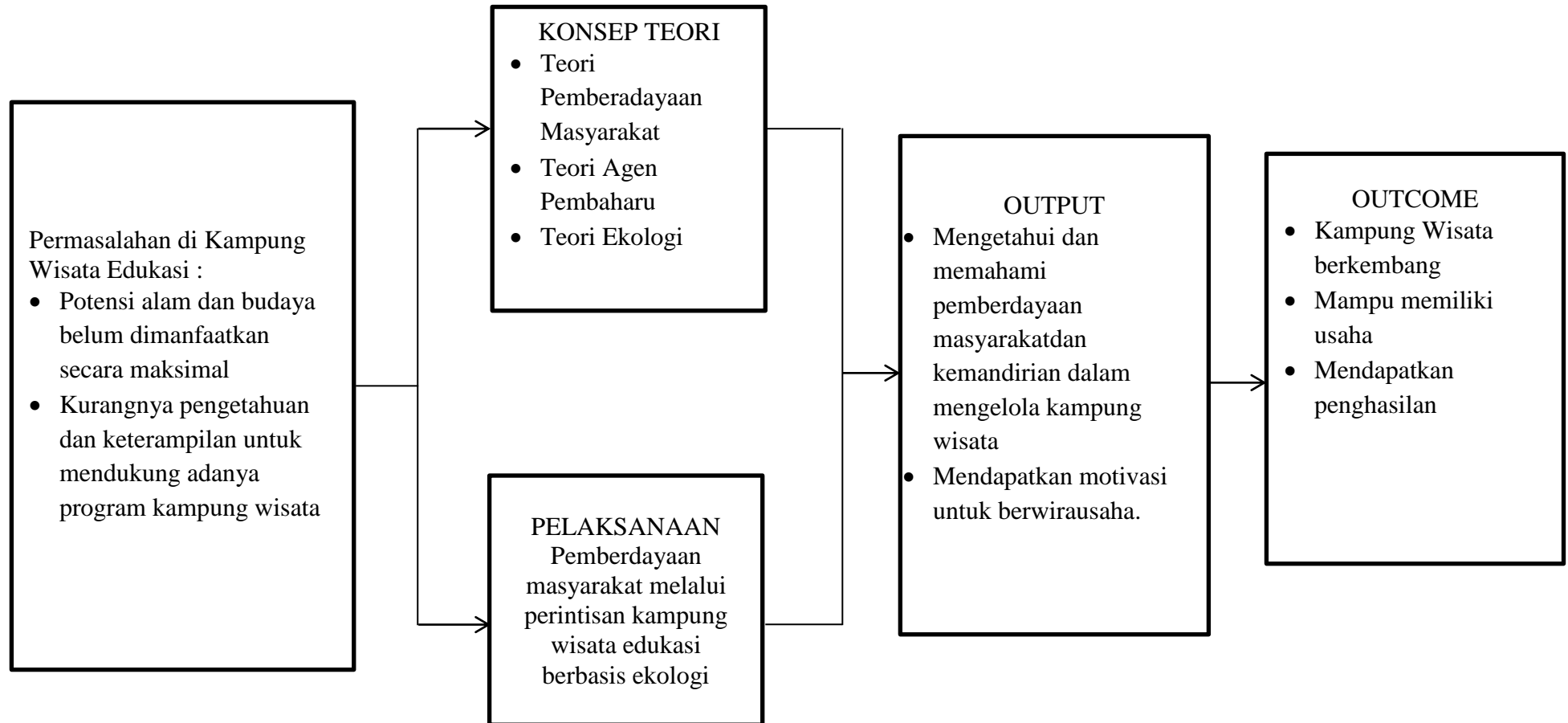
- c. Sigit Nurdianto (dalam Innuh Indrawan, M, 2019), Relevansi pada penelitian saya yaitu Penelitiannya Yang Membahas Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan (Studi Di Desa Wisata Bleberan, Kecamatan Player, Kabupaten Gunungkidul). Dikatakan bahwa masyarakat Desa Wisata Bleberan, Kecamatan Player, Kabupaten Gunungkidul terlibat dalam empat tahap partisipasi yaitu : tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap pengambilan manfaat, dan tahap evaluasi. Ada dua bentuk partisipasi yaitu: partisipasi yang berwujud nyata yang meliputi partisipasi uang, tenaga, keterampilan. Pada peneliian saya di Kampung Wisata Legokawi pun masyarakat lokal dan Agen Pembaharu saling bekerja sama sehingga dalam tahap partisipasi berwujud nyata mereka benar – benar saling berpartisipasi, saling melengkapi. Lalu ada partisipasi yang tidak berwujud atau bersifat abstrak yaitu: partisipasi ide, dan pengambilan keputusan. Pada partisipasi tidak terwujud atau abstrak masyarakat di Kampung Wisata Legokawi sangat aktif dalam memberikan ide dan gagasan agar pembangunan di Kampung Legokawi sangat berjalan dengan baik dan lancar. Keikutsertaan masyarakat

dalam pengembangan desa wisata didorong oleh beberapa faktor yaitu, motivasi dan manfaat yang diharapkan masyarakat.

- d. (Murdiyanto, 2011), dengan tema Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem, Sleman. Desa Wisata Karanggeneng memiliki potensi yang besar dalam sejarah, lingkungan alam atau kondisi geografis dan bentang alam, sosial ekonomi, budaya, arsitektur dan struktur tata ruang bagi pengembangang Kampung Wisata. Sama dengan kondisi di Kampung Wisata Legokawi, dilihat dari potensi lingkungan atau kondisi geografisnya, sosial ekonomi dan budaya Kampung Wisata Legokawi mempunyai semua itu tetapi dalam pembangunannya masyarakat kurangnya pengetahuan, sehingga dengan adanya Agen Pembaharu yang membantu masyarakat disana menjadi sedikit demi sedikit bisa untu membangun dan mengembangkan Kampung Wisata di Legokawi tersebut. Walaupun masyarakat disana masih belum leluasa untuk berpartisipasi dalam pemikiran, tenaga dan materi untuk pengembangan Kampung Wisata namun siap berpartisipasi apabila diajak secara aktif oleh pengelola untuk berpartisipasi.
- e. (Rohim, 2013), dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY), pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata yang dilakukan oleh pengelola dalam hal ini Pokdawais Dewa Bejo diterapkan dalam bidang atraksi dan akomodasi Wisata. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang tersebut adalah dengan menyelenggarakan, pertemuan, pendampingan, bantuan modal, bantuan modal dengan stimulan, pembangunan sarana dan prasarana, pembentukan Pokdawis Dewa Bejo. Sama dengan halnya di Kampung Wisata Legokawi, Agen Pembaharu sebelum melakukan pembangunan diadakannya pertemuan dan pendampingan terlebih dahulu agar masyarakat dapat menerima dengan baik dan masyarakat bisa diajak untuk berpastisipasi aktif. Pengembangan Desa Wisata Bejiharjo memiliki dampak sosial – budaya mencakup peningkatan kualitas SDM, perubahan perilaku masyarakat agraris ke masyarakat

pariwisata, pelestarian Seni wayang beber yang sudah langka ditemukan di Jawa, namun disisi lain menimbulkan konflik keributan kepengelolaan.

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan di Kampung Wisata Edukasi yang berlokasi di Kampung Legokawi Desa Cukangjayaguna Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Dimana Kampung a Edukasi merupakan suatu kampung yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat setempat. Kegiatan pemberdayaan bertujuan agar para masyarakat sekitar memiliki penghasilan, kurangnya menggali potensi alam maupun budaya yang ada, kurang akan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung kegiatan pariwisata, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung wisata diharapkan dapat memberikan pengetahuan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami pemberdayaan masyarakat melalui kampung wisata edukasi, mendapatkan bekal kesiapan dalam berwirausaha pembuatan produk, selain itu juga mendapatkan motivasi. Sehingga dalam kegiatan pemberdayaan ini masyarakat akan mampu berwirausaha dan membuka usaha sendiri sehingga mendapatkan penghasilan.

Pemberdayaan masyarakat dalam perintisan kampung wisata menjadi bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas yang dibuat menjadi suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara tradisi yang berlaku sehingga dapat melestarikan budaya di kampung wisata edukas. Kriteria suatu wilayah bisa dikatakan sebagai kampung wisata salah satunya adalah adanya atraksi wisata yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Seperti di Desa Legokawi Desa Cukangjayaguna Kabupaten Tasikmalaya terdapat kampung yang disebut Kampung Wisata Edukasi, sesuai dengan namanya bahwa didalam kampung tersebut terdapat berbagai macam – macam kreativitas yang dibuat dari alam, produk – produk buatan masyarakat seperti Pisdong (Pisang Sodong), Teh, dll. Tetapi dalam pembangunan Kampung Wisata ini adanya kendala Kampung Legokawi masih dalam proses promosi agar Kampung Wisata Edukasi dapat dikenal oleh masyarakat luas sehingga Kampung Wisata Edukasi di Legokawi lebih maju dan menjadi destinasi wisata yang mempunyai daya tarik.

2.4. Pertanyaan Penelitian

- 2.4.1. Bagaimana proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Perintisan Kampung Wisata Edukasi Berbasis Ekologi di Kampung Legokawi Desa Cukangjayaguna?
- 2.4.2. Bagaimana peran agen pembaharu dalam Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Legokawi Desa Cukangjayaguna?
- 2.4.3. Bagaimana Perencanaan dalam Perintisan Kampung Wisata Edukasi Berbasis Ekologi sehingga bisa menjadi ciri khas?